



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan tinjauan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka secara garis besar dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari kajian teori tentang Kantor Gubernur Sumatra Barat, dapat disimpulkan bahwa Kantor Gubernur merupakan kantor pusat pemerintahan ibukota propinsi. Kantor Gubernur Sumatera Barat terletak di ibukota Propinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang. Kantor Gubernur ini terletak di salah satu jalan protokol yaitu di jalan Jend. Soedirman No.15. Kantor Gubernur sangat penting agar dapat mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan segala bentuk kegiatan propinsi.
2. Setelah kejadian ini sistem pemerintahan Propinsi Sumatera Barat menjadi terganggu. Karena sebagian besar dari gedung ini mengalami kerusakan yang parah sehingga untuk sementara urusan pemerintahan Propinsi Sumatera Barat terbagi 2 yaitu: pada kantor gubernur yang tidak mengalami kerusakan dan sebagian lagi bertempat di Terminal Bis Regional Bingkuang.
3. Pada awal tahun 2010 kota Padang mulai mengalami pembangunan besar-besaran. Gedung-gedung yang hancur maupun yang rusak parah mulai di bangun kembali. Tidak terkecuali juga Kantor Gubernur Sumatera Barat juga akan di bangun kembali. Karena gedung ini sangat penting bagi sistem pemerintahan di Propinsi Sumatera barat
4. Gedung yang dipergunakan oleh para Pegawai Kantor Gubernur Sumatra Bartat, memiliki total jumlah pegawai sebanyak 679 orang terdiri dari 91 orang staff ahli gubernur, 4 orang sekretaris daerah, 64 orang biro pemerintahan dan kependudukan, 36 orang biro hokum, 65 orang biro humas dan protokol, 41 orang biro perekonomian, 61 orang biro bina sosial, 45 orang biro organisasi, 54 orang biro pembangunan dan kerjasama rantau, dan 222 orang biro umum. .



Banyaknya jumlah pegawai yang ada, menyebabkan ruangan yang ada saat ini menjadi sangat tidak memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman dan jauh di bawah standar persyaratan yang diperlukan untuk mendukung produktivitas. Permasalahan yang lain yaitu ruangan yang tersedia sewaktu belum gempa, jauh dari persyaratan standar gedung pemerintahan di karenakan gedung ini berdiri lebih dari 50 tahun yang

5. Luas lahan Kantor Gubernur Sumatra Barat saat ini adalah  $\pm 40.000$  m<sup>2</sup>

#### 4.2 BATASAN

Batasan yang digunakan dalam Perencanaan dan Perancangan Kantor Gubernur Sumatra Barat di Padang , antara lain:

- 1) Perencanaan Kantor Gubernur Sumatra Barat dilakukan dengan memperhatikan *masterplan* dari Dinas Tata Kota
- 2) Lokasi tapak berada di wilayah kawasan perkantoran.
- 3) Penentuan fasilitas yang tersedia pada Perencanaan Kantor Gubernur Sumatra Barat didasarkan pada hasil suvey yang telah dikaji yang berkaitan dengan sarana inti serta sarana penunjangnya.
- 4) Perencanaan Kantor Gubernur Sumatra Barat diproyeksikan hingga tahun 2021 (sepuluh tahun kedepan).
- 5) Masalah yang menyangkut disiplin ilmu di luar arsitektur tidak dibahas secara mendalam.

#### 4.3 ANGGAPAN

Adapun anggapan-anggapan dalam Perencanaan dan Perancangan Kantor Gubernur Sumatra Barat, antara lain :

- 1) Tapak existing di Jln.Jend Soedirman no 15 dianggap masih layak untuk Perencanaan dan Perancangan Kantor Gubernur Sumatra Barat. Tapak tersebut siap untuk dibangun secara teknis, dimana struktur serta daya dukung tanah dianggap memenuhi untuk didirikan fasilitas dalam proses Perencanaan dan Perancangan Kantor Gubernur Sumatra Barat.

TUGAS AKHIR 114  
KANTOR GUBERNUR SUMATERA BARAT DI PADANG



- 2) Data yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan perancangan dianggap memenuhi persyaratan hingga sepuluh tahun mendatang.
- 3) Kemajuan teknologi dapat diterapkan pada perancangan fisik bangunan maupun kawasan.
- 4) Biaya perencanaan, pembangunan dan operasional dianggap tersedia oleh pihak swasta yang bekerjasama dengan pemerintah